

TINGKAT PENGETAHUAN WAWASAN KEBANGSAAN PEMBINA PRAMUKA DI SURABAYA

Rahayu Anggraeni Budi Utami

16040254064 (PPKn,FISH, UNESA) rahayu.anggraeni1998@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

0014057403 (PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina Pramuka di Surabaya. Penelitian ini melibatkan 99 responden sebagai sampel yang meliputi Pembina Pramuka golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa angket soal pengetahuan tentang wawasan kebangsaan yang berjumlah 40 butir soal pilihan ganda. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman dalam bentuk persentase dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat wawasan kebangsaan Pembina Pramuka di Surabaya secara keseluruhan tergolong sedang berdasarkan ketiga indikator yang diambil dari materi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada indikator materi Bhinneka Tunggal Ika menjadi indikator yang menjelaskan tingkat pengetahuan Pembina Pramuka di Surabaya akan kebhinekaan tergolong tinggi, sedangkan pada materi UUD NRI 1945 menunjukkan rata – rata tingkat pengetahuannya tergolong sedang. Ini berarti perlu ada tindak lanjut dari *stake holder* Gerakan Pramuka untuk memberikan perhatian pada Pembina Pramuka akan wawasan ketatanegaraannya karena Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan perundang – undangan khususnya kepada kelangsungan hidup Gerakan Pramuka.

Kata Kunci: Tingkat pengetahuan, Wawasan Kebangsaan, Pembina Pramuka.

Abstract

This study aims to describe the level of knowledge of the scout coaches' national insight in Surabaya. This study involved 99 respondents as a sample which included the scout coaches of the standby class, mobilizers, enforcers, and pandega. This research uses a quantitative approach with descriptive research type. The data collection technique was in the form of a questionnaire about knowledge about national insight, amounting to 40 multiple choice questions. The data analysis technique in this study used the Guttman scale in the form of a percentage with the low, medium, and high categories. The results showed that the level of national insight of the Scout Guards in Surabaya as a whole was classified as moderate based on the three indicators taken from the material of Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, NKRI, and Bhinneka Tunggal Ika. In the material indicator Bhinneka Tunggal Ika is an indicator that explains the level of knowledge of Scout coaches in Surabaya on diversity is classified as high, while in the material of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia it shows that the average level of knowledge is classified as moderate. This means that there needs to be a follow-up from the Scout Movement's stake holders to pay attention to the Scout Guards regarding their constitutional insight because the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the highest constitution which is the basis for implementing legislation, especially for the survival of the Scout Movement.

Keywords: Knowledge level, National Insight, Scout Guidance.

PENDAHULUAN

Integrasi Nasional menurut Kurana (dalam Nurwardhani,dkk,2016:56) adalah kesadaran identitas bersama yang memiliki perbedaan suku, ras, agama, bahasa, daerah maupun tingkat sosialnya untuk terus membangun rasa persaudaran yang membangun suatu bangsa antar warga Negara. Ironisnya, integrasi yang

terjadi di Indonesia belum bisa dikatakan ideal. Tantangan masih dirasakan baik dari dimensi vertikal maupun dimensi horizontal. Dimensi vertikal adalah sekat antara kaum elit dengan kaum massa karena latar belakang pendidikan atau perekonomiannya. Sedangkan dimensi horizontal adalah perbedaan yang terjadi karena suku, ras, agama dan budaya.

Negara berkembang seperti Indonesia dalam dimensi horizontal memiliki berbagai macam permasalahan seperti intoleransi dan etnosentrisme yang kuat. Menurut (Halim,2008:9) intoleransi adalah sudut pandang, sikap, dan perilaku yang terbentuk dari pola seperti eksklusifisme (ketertutupan dalam berideologi atau beragama dan kekakuan mental yang disebabkan oleh fanatisme berbasis doktrin dogmatis. Intoleransi dapat pula dipahami dengan sikap ketidakmauan untuk menerima orang yang berbeda keyakinan, ideologi maupun keyakinannya.

Sikap intoleransi tidak muncul dengan sendirinya. Menurut (Silviana,2007:20), pembentukan sikap pada individu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, kebudayaan, pendidikan, media massa dan sebagainya. Intoleransi yang sering terjadi di Indonesia adalah intoleransi antar umat beragama. Negara Indonesia yang mayoritasnya islam ini membuat beberapa warga Negara Indonesia mengusulkan Indonesia menjadi Negara khilafah. Pernyataan ini diberitakan SUARA.com pada tanggal 9 Juni 2017 dimana sekitar 7 persen warga Negara Indonesia menurut survei yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyatakan ingin mengubah NKRI menjadi Negara khilafah. Walaupun jumlahnya masih kecil tetapi potensi ini apabila diacuhkan akan menjadi skala besar dan mengancam. (Dikutip dari SUARA.com, diakses pada 27 januari 2020)

Pada Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengandung prinsip bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Republik. Hal ini diperkuat kembali pada pasal 37 ayat (5) “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan” . Indonesia berkomitmen tidak akan mengubah bentuk negara. Apabila dasar hukum masih menimbulkan kasus maka perlu dipertanyakan bagaimana pendidikan formal yang didapat dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sudah diberikan di bangku sekolah.

Menyikapi situasi demikian, pemerintah perlu memberikan perhatian untuk menanamkan rasa kebangsaan sehingga kembali dalam ruh Sumpah Pemuda yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Salah satunya ditempuh dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). Peraturan ini akan menjadi payung hukum untuk menyebarkan wawasan kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya pada dunia pendidikan sangat dibutuhkan pendidikan wawasan kebangsaan mulai dini.

Wawasan kebangsaan adalah perspektif Indonesia tentang diri dan lingkungan untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang

berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Permendagri No.71 Tahun 2012). Pemberian pendidikan wawasan kebangsaan ini selain didapat dari pendidikan formal, peserta didik dapat menambah pengetahuan, mengasah bakat dan ketrampilan melalui pendidikan non formal salah satunya kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Gerakan Pramuka dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 bertanggungjawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menopang empat konsensus kebangsaan wawasan kebangsaan yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. (UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka).

Salah satu tujuan Gerakan Pramuka adalah menjadikan manusia memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa yang dikuatkan dalam penerapan ekstrakurikuler wajib pramuka pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta menjadikan pramuka sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa di Perguruan Tinggi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014. Penerapan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan ini diambil alih oleh anggota dewasa yang dinamakan pembina pramuka. Pembina pramuka merupakan tenaga pendidik Gerakan Pramuka yang bertugas melatih (membina) peserta didik di gugus depan (Polmekbindega No. 176 Tahun 2013). Pembina pramuka harus memiliki kompetensi yang berkualitas guna mendidik peserta didik yang berkepribadian luhur melalui pelatihan – pelatihan yang terarah seperti Kursus Mahir Pembina Pramuka Tingkat Dasar dengan kurikulum khusus sesuai dengan jenjangnya.

Idealnya dengan adanya kursus berjenjang yang diberikan semua Pembina baik sikap dan perilaku sudah menjadi tempat percontohan peserta didik dalam mengamalkan wawasan kebangsaan yang ada. Namun lain halnya dengan peristiwa yang terjadi diawal tahun 2020 yang dikutip Kompasiana.com pada tanggal 13 Januari 2020 dimana pada saat kegiatan Kursus Pembina Pramuka Tingkat Mahir Lanjutan (KML) di Yogyakarta yang dilakukan oleh peserta latihan mengajarkan tepuk dan jargon pramuka kepada peserta didik sekolah dasar saat sesi praktik membina dengan kalimat “Islam islam yes yes, kafir – kafir no.” Hal demikian menunjukkan bahwa belum semua Pembina pramuka mengerti bahwa Indonesia mengakui lebih dari satu agama dengan harapan

toleransi antar umat beragama terjaga. Kasus ini menjadi contoh dari faktor dari dalam negeri yang dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yaitu munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit. (Dikutip dari *jogja.suara.com* diakses pada 13 Januari 2020)

Fakta ini menjadi ancaman besar di dunia pendidikan khususnya pendidikan non formal yang diwadahi oleh Gerakan Pramuka. Kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi taruhan apabila hal ini masih dibiarkan. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui kecenderungan terhadap Pembina Pramuka di Surabaya pada tingkat pengetahuan wawasan kebangsaannya. Salah satu penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini dari Ricky Rachmanto (2015) dengan judul Pemahaman Kader Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) – Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU) Universitas Negeri Surabaya yang meneliti pada tingkat pemahaman kader pimpinan IPNU dan IPPNU Unesa dengan indikator yang diambil dari sub materi wawasan kebangsaan seperti pengertian wawasan kebangsaan, nilai dasar wawasan kebangsaan dan unsur wawasan kebangsaan. Sedangkan penelitian ini akan melihat tingkat pengetahuan Pembina Pramuka dengan menggunakan indikator materi wawasan kebangsaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Notoatmodjo dalam Imas Masturoh dan Nauri Anggita (2018:4) menyimpulkan pengetahuan merupakan hasil dari tahu setelah orang melakukan penginderaan yakni indera pendengaran, penciuman, peraba, perasa, serta penglihatan terhadap suatu objek tertentu. Persebaran Pembina Pramuka di Surabaya memiliki populasi yang tinggi yaitu 6.820 pembina Pramuka berdasarkan Data Statistik Anggota Pramuka golongan Pembina dari Sistem Informasi Anggota Pramuka oleh Kwartir Daerah Jawa Timur. Pembina Pramuka dalam penelitian ini adalah Pembina Pramuka yang membina di sekolah tingkat dasar, menengah serta perguruan tinggi yang tergolong dalam golongan siaga, penggalang, penagak dan pandega.

Menurut Loren Anderson (dalam Prihantoro, 2010:400) Domain yang sangat penting dimiliki seseorang adalah pengetahuan. Tingkat pengetahuan mempunyai enam tingkatan Taksonomi Bloom yang telah direvisi Anderson meliputi pertama, mengingat (*remembering*) merupakan usaha untuk mendapatkan memori pengetahuan masa lalu. Kedua, memahami (*understand*) merupakan aktivitas membangun pengertian dari berbagai informasi yang didapat/komunikasikan. Ketiga, menerapkan (*applying*) merupakan melaksanakan prosedur yang dibuat. Keempat, menganalisis (*analyze*) merupakan

proses mencari keterkaitan bagian dari setiap masalah yang ada. Kelima, mengevaluasi (*evaluate*) merupakan penilaian terhadap sesuatu dengan kriteria dan standar yang sudah dibuat. Keenam yaitu menciptakan (*create*) dimana peserta didik dapat menghasilkan suatu karya yang dapat dinilai.

Menurut Notoatmodjo (dalam Yanuar, 2010:11) pengetahuan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pendidikan, pekerjaan, usia dan lingkungan. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi yang dapat menunjang pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Faktor selanjutnya adalah pekerjaan dimana pengetahuan dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari lingkungan pekerjaannya. Seseorang akan yang lebih banyak berinteraksi dengan orang lain juga akan memengaruhi pengetahuannya. Pengalaman dan ketrampilan profesional serta pengalaman belajar akan dapat mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan. Ketiga, usia dimana semakin cukup umur tingkat kematangan akan pengetahuan juga semakin matang karena setiap tahun mengalami hal berbeda yang terkumpul dalam memberi membentuk pengalaman. Terakhir adalah lingkungan dimana perilaku individu akan berbeda setiap individu tergantung lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangannya.

Wawasan kebangsaan terdapat dua kata yang dijelaskan yaitu kata wawasan dan kebangsaan. Pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa wawasan berasal dari kata “mawas” yang artinya memandang, mengamati, menilai, atau meninjau. Wawasan juga berarti dapat diartikan sebagai pandangan. Sedangkan kebangsaan adalah ciri atau identitas yang menandai golongan suatu bangsa. (Badudu 2001:122). Prof Muladi, Gubernur (Lemhanas RI 2005-2011) menyampaikan bahwa perspektif negara Indonesia melihat diri sendiri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat struktural dari integrasi nasional memaknai suatu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. (Basseng, 2019 : 22). Sehingga pernyataan ini menyimpulkan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 71 Tahun 2012, tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan memiliki materi yang harus disampaikan kepada masyarakat meliputi Pancasila, Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Widodo (2019:13-24) Pancasila yang dijiwai dari nilai

luhur suatu agama merupakan sumber dari nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tidak heran Pancasila menjadi pondasi utama dalam wawasan kebangsaan. Pilar kedua adalah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi dengan hukum aturan tertinggi yang keberadaannya didasari untuk kedaulatan rakyat. Disisi lain, Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia juga memuat tujuan nasional yang memuat cita – cita suatu bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan yang diinginkan tercapai dan dilaksanakan disetiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu konstitusi tertulis ini harus benar – benar dikawal agar selalu benar – benar dilaksanakan aturan yang telah dibuat. (Sukriono,2016:273 – 283).

Selanjutnya, pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan materi dalam Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Seperti yang diketahui dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Pasal 1 dimana bentuk Negara Indonesia adalah Republik. Artinya suatu negara yang memiliki pembagian kekuasaan terinci antara pusat dan daerah guna mewujudkan tujuan negara yang kedaulatannya berada ditangan rakyat. Arfa'I (2013:142-154) berpendapat bahwa bentuk negara merupakan suatu negara yang mempunyai satu dewan menteri, satu kepala negara, dan satu undang – undang dasar. Indonesia menerapkan negara kesatuan salah satu alasannya karena Indonesia menginginkan satu kesatuan teritorial dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kepemilikan sumber kekayaan alam yang besar, satu kesatuan landasan ideologi yaitu Pancasila. Ini menjadi modal dalam merangkul keragaman suku, rasa, agama, dan budaya yang mejadi ancaman akan adanya sifat kedaerahan dan merusak rasa persatuan dan kesatuan.

Menurut Irham (2012:125-150) demi merangkul setiap insan yang berbeda suku, agama, rasa, dan bahasa ini, Indonesia telah mencetuskan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang secara sederhana diartikan “Berbeda – beda tetapi tetap satu jua”. Motto ini dibuat dengan mempertimbangkan pluralitas dengan segala bentuknya. Teori Pembentukan Karakter Thomas Lickona menjadi dasar dalam penelitian ini. Kualitas karakter seseorang ditentukan dari tiga hal yaitu Pengetahuan Moral (*Moral Knowing*), Perasaan Moral (*Moral Feeling*), dan Tindakan Moral (*Moral Action*).

Pada *moral knowing* atau pengetahuan moral, pengetahuan tentang wawasan kebangsaan yang mewadahi akan menjadi pedoman seseorang dalam menentukan perspektif berdasarkan sudut pandangnya, memikirkan dari hasil pemahaman akan suatu objek serta berpengaruh pada pengambilan keputusan seseorang. Pengetahuan merupakan hasil tahu seseorang melalui

penginderaan yang dimiliki tentang objek tertentu. Pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat memengaruhi perasaan dan tindakan yang akan dilakukan.

Komponen yang kedua adalah *Moral Feeling* atau perasaan moral. Komponen ini mengarah kepada nilai – nilai kebangsaan yang ditunjukkan menjadi sikap dan perilaku yang nampak untuk bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan komponen yang ketiga adalah *Moral Action* atau perilaku moral. Komponen ini mendeskripsikan pada bukti perilaku yang ditunjukkan untuk merepresentasikan rasa kebangsaan. Lickona (2012:84) mengatakan bahwa seseorang dikatakan memiliki karakter yang baik apabila *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* terpenuhi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Menurut Arikunto (2010:27), penelitian kuantitatif berpacu pada pengumpulan data yang menggunakan angka, penafsirannya hingga hasil pembahasan pada data tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di Surabaya karena jumlah Pembina Pramuka di Surabaya termasuk populasi yang tinggi yaitu 6.820 berdasarkan data statistik anggota pramuka yang tersebar di Surabaya golongan Pembina dari Sistem Informasi Anggota Pramuka oleh Kwartir Daerah Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Cluster Sampling* atau teknik sampling daerah. Sampel ini diambil di daerah Surabaya yang terdiri dari lima wilayah yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, dan Surabaya Barat. Penelitian ini menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi 10% dan ditemukan sebanyak 99 responden yang akan dijadikan sampel.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yakni tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina pramuka di Surabaya. Definisi dari variabel tersebut adalah tinggi rendahnya pengetahuan seseorang pembina pramuka dalam memahami perspektif Indonesia tentang diri dan lingkungan untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai upaya pembelajaran kepada peserta didik dalam hal ini anggota pramuka yang berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan berkebangsaan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes tulis yang memanfaatkan aplikasi *google form* dengan link bit.ly/artikelrahayu dengan pertanyaan tertutup.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dalam bentuk persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{n}{N} \times 100 \%$$

Keterangan : P = hasil akhir persentase

n = nilai yang diperoleh dalam angket

N = jumlah responden

Agar instrumen dikatakan layak dan akurat maka instrument angket perlu di uji validitas dan reliabilitas (Arikunto, 2010:168). Hasil yang tunjukkan pada uji validitas mengatakan bahwa 39 soal melebihi r tabel 0,195 sedangkan 1 soal nilai r hitung lebih rendah menyatakan tidak valid soal tersebut dilihat dari tabel r *product moment* dengan jumlah sampel 99 responden.. Sedangkan reliabilitasnya menunjukkan 0,765 artinya reliabilitas tinggi. Data yang sudah valid dan reliabel perlu dikuantitatifkan untuk persentase skor angketnya. Penentuan skor terhadap jawaban respon responden sebagai berikut:

Skor jawaban apabila benar adalah 1

Skor jawaban apabila salah adalah 0

Skor yang didapat tentu berdasarkan kriteria penilaian yang sudah ditentukan. Kriteria penilaian pada tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina pramuka di Surabaya ini menggunakan tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Analisis dilakukan dengan menggunakan rumus interval sebagai berikut:

$$i = \frac{(Xi - Xr) + 1}{Ki}$$

Keterangan :

i : Interval

Xi : Nilai Tertinggi

Xr : Nilai Terendah

Ki : Kelas Interval

Nilai tertinggi yang didapatkan jika dapat menjawab semua soal yang diujikan adalah 40 sedangkan nilai terendahnya adalah 0. Kemudian nilai tersebut dimasukkan dalam rumus interval tingkat pengetahuan (Azwar, 2002:107) sebagai berikut :

Interval = $\frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}$

Jumlah kelas

$$= \frac{40 - 0}{3}$$

$$= 13,33 \text{ dibulatkan menjadi } 13$$

Responden yang mendapatkan nilai 0 sampai dengan 13,33 dikatakan memiliki pengetahuan yang rendah, kemudian responden yang mendapatkan nilai antara 13,34 – 26,67 dikatakan memiliki pengetahuan yang sedang dan responden yang mendapatkan nilai 26,68 – 40 dikatakan memiliki pengetahuan yang tinggi.

Tabel 1. Interval Tingkat Pengetahuan Wawasan Kebangsaan Pembina Pramuka di Surabaya

Interval	Kategori
26,68 – 40	Tinggi
13,34 – 26,67	Sedang
0 – 13,33	Rendah

Berdasarkan tabel interval diatas adalah kategori penilaian keseluruhan dari keempat materi wawasan kebangsaan yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dimana kategori terendah jika responden mendapatkan nilai dari 0 sampai 13,33 soal maka tergolong tingkat pengetahuan yang rendah terhadap wawasan kebangsaan. Kategori 13,34 – 26,67 soal yang berhasil dijawab menandakan responden memiliki pengetahuan yang sedang terhadap wawasan kebangsaan. Sedangkan 26,68 – 40 artinya tingkat pengetahuan responden terhadap wawasan kebangsaan memiliki kategori yang tinggi. Penelitian ini selain mengukur tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan secara keseluruhan juga akan dianalisis tiap – tiap indikator yang meliputi indikator Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang masing- masing memiliki skor paling tinggi adalah 10 dan paling rendah adalah 0. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya interval yang membedakan kategori rendah, sedang, dan tinggi pada setiap materi wawasan kebangsaan sebagai berikut:

Tabel 2. Interval tingkat pengetahuan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika Pembina Pramuka di Surabaya

Interval	Kategori
6,68- 10	Tinggi
3,34 – 6,67	Sedang
0 – 3,33	Rendah

Setelah kategori baik pada tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan yang mencakup 4 materi maupun tiap – tiap indikator ditentukan selanjutnya akan dilakukan persentase dengan mendeskripsikan hasil persentase setiap indikatornya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengetahuan Wawasan Kebangsaan Pembina Pramuka di Surabaya

Surabaya merupakan kota padat penduduk dan menjadi ibukota Provinsi Jawa Timur sehingga Surabaya juga dikatakan ibukota kedua setelah Jakarta. Surabaya yang luasnya sekitar 350,54 km² dengan penduduk berjumlah 2.917.688 (2018) menjadikan kota ini padat penduduk karena banyak orang desa yang berurbanisasi. Jumlah penduduk yang banyak ini juga menjadikan Kota Surabaya memiliki jumlah pembina pramuka tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah 6.820 (SIPA Kwarda Surabaya, 2019) pembina pramuka yang tersebar dalam berbagai wilayah.

Pengetahuan adalah hasil tahu seseorang melalui penginderaan yang dimiliki tentang objek tertentu. Pengetahuan yang dimiliki individu dapat mempengaruhi perasaan dan tindakan yang akan dilakukan. Dalam hal ini telah dilakukan penelitian tentang tingkat pengetahuan

wawasan kebangsaan Pembina pramuka di Surabaya. Analisis tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina pramuka di Surabaya dilakukan dengan menggunakan rumus interval dan rumus persentase. Kemudian dilakukan analisis perindikator tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina pramuka di Surabaya untuk melihat lebih rinci hasil analisis yang telah dijabarkan dari hasil hitung menggunakan rumus persentase tersebut.

Dalam penelitian ini ada 3 kategori untuk melihat ukuran tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan pembina pramuka di Surabaya yakni tinggi, sedang, dan rendah. Kelas interval yang telah dihitung dengan rumus interval kemudian dicocokkan dengan hasil tabulasi untuk total pembina pramuka yang memiliki tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk mengetahui persentase Pembina pramuka yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, sedang, dan rendah menggunakan rumus persentase.

Berikut ini adalah tabel tingkatan pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina pramuka di Surabaya dalam mempermudah pembacaan:

Tabel 3. Tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina pramuka di Surabaya

Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
26,6 –40	Tinggi	9	9%
13,34–26,67	Sedang	75	76%
0–13,33	Rendah	15	15%
Skor rata – rata = 21,76 (sedang)			

Sumber : Data Primer, diolah 2020

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 75 reponden atau 76% dari 99 responden yang berarti keseluruhan jumlah sampel tergolong kategori sedang. Responden yang tergolong dalam kategori tinggi terdapat 9 responden atau 9% yang memperoleh skor tersebut sedangkan yang lainnya tergolong kategori rendah menunjukkan skor rata – rata rendah dalam tingkat pengetahuan wawasan Pembina pramuka di Surabaya dengan jumlah responden 15%.

Berdasarkan data tabulasi yang dibuat diketahui bahwa skor total menunjukkan jumlah 2155. Ini berdasarkan dari keseluruhan indikator yang ada. Kemudian dilihat skor rata – rata berasal dari perhitungan jumlah skor keseluruhan dibagi dengan jumlah responden seluruhnya yaitu 2155 dibagi 99 responden sehingga hasil menunjukkan 21,76 yang dilihat dari kelas interval berada dalam kategori sedang.

Selain hasil secara keseluruhan, penelitian ini juga melihat skor dari masing – masing indikator yaitu dari materi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tingkat Pengetahuan tentang Pancasila

Pancasila merupakan landasan ideologi atau dasar hukum Negara Indonesia yang tidak dapat diubah isinya. Pancasila yang dijabarkan dipendidikan kepramukaan dituangkan dalam dasa dharma pramuka. Untuk mengukur tingkat pengetahuan tentang Pancasila Pembina pramuka di Surabaya, penelitian ini menggunakan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Analisis penentuan interval tinggi, sedang, dan rendah menggunakan rumus interval. . Kelas interval yang telah dihitung dengan rumus interval kemudian dicocokkan dengan hasil tabulasi untuk total pembina pramuka yang memiliki tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk mengetahui persentase pembina pramuka yang memiliki pengetahuan yang tinggi, sedang, dan rendah menggunakan rumus persentase.

Berikut ini persentase tingkat pengetahuan pada materi Pancasila pembina pramuka yang dikategorikan dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi.

Tabel 4. Persentase tingkat pengetahuan tentang Pancasila

Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
6,68- 10	Tinggi	14	14%
3,34 – 6,67	Sedang	73	74%
0 – 3,33	Rendah	12	12%
Total		99	100%
Skor rata – rata = 5,28 (sedang)			

Sumber: Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4. Diketahui bahwa hasil analisa data berdasarkan perhitungan terdapat 14 orang atau 14% dari 99 pembina pramuka di Surabaya yang memiliki tingkat pengetahuan dengan kategori tinggi. Lalu sebanyak 73 orang atau sebanyak 74% Pembina pramuka di Surabaya memiliki tingkat pengetahuan sedang dan sebanyak 12 orang lainnya atau 12% Pembina pramuka yang memiliki tingkat pengetahuan tentang Pancasila rendah.

Pada pengetahuan Pancasila nilai tertinggi yang didapatkan oleh responden adalah 10 berdasarkan data tabulasi yang telah dihitung. Hal ini berarti responden mampu menjawab semua soal yang telah diberikan. Sedangkan total skor terendah responden adalah 3. Rata – rata total skor indikator Pancasila Pembina pramuka adalah 5,28. Berdasarkan perhitungan interval yang telah dilakukan, maka rata – rata skor tersebut menyatakan bahwa Pembina pramuka memiliki pengetahuan Pancasila yang tergolong dalam kategori sedang.

Tingkat Pengetahuan Tentang UUD NRI Tahun 1945

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar atau konstitusi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan suatu Negara.

Undang – undang Dasar ini menempati tata urutan peraturan perundang – undangan tertinggi dalam Negara. Penelitian ini menggambarkan tingkat pengetahuan Pembina pramuka di Surabaya pda materi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini presentase dan skor rata yang disajikan dalam tabel dibawah ini dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi.

Tabel 5. Persentase tingkat pengetahuan tentang UUD NRI Tahun 1945

Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
6,68- 10	Tinggi	2	2%
3,34 – 6,67	Sedang	55	55%
0 – 3,33	Rendah	42	43%
Total		99	100%
Skor rata – rata = 4,07(sedang)			

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan sebanyak 55 responden dari keseluruhan responden atau 55% Pembina pramuka di Surabaya memiliki tingkat pengetahuan yang sedang terhadap materi UUD NRI tahun 1945. Selain itu sebanyak 42% atau 42 responden dari keseluruhan responden memiliki ketegori yang rendah pada materi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan 2% nya atau 2 responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap materi UUD NRI tahun 1945.

Berdasarkan data didapat dari hasil jawaban kuis soal yang tersebar melalui *google form* ini telah diisi oleh Pembina pramuka di Surabaya sebanyak total skor 403 dari nilai maksimum 990 dengan rata – rata skor 4,07. Skor ini menunjukkan masuk pada interval skor 3,34 – 6,67 yang artinya tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina pramuka di Surabaya tergolong dalam kategori sedang. Skor rata – rata 4,07 ini didapat dari pembagian hasil akumulasi skor 99 responden yaitu 403 yang menjawab benar dibagi dengan jumlah responden.

Tingkat Pengetahuan Tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk Negara Indonesia yang tidak dapat diubah dan ditegaskan padal pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini mendeskripsikan tingkat pengetahuan tentang NKRI. Untuk mengukur tingkat pengetahuan Pembina pramuka tentang NKRI dilakukan analisis menggunakan penentuan interval tinggi, sedang, dan rendah yang menggunakan rumus interval. Kelas interval yang telah dihitung dengan rumus interval kemudian dicocokkan dengan hasil tabulasi untuk total pembina pramuka yang memiliki tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk mengetahui persentase Pembina pramuka yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi,

sedang, dan rendah menggunakan rumus persentase. Berikut ini presentase dan skor rata – rata yang terangkum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Persentase tingkat pengetahuan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia

Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
6,68- 10	Tinggi	12	12%
3,34 – 6,67	Sedang	62	63%
0 – 3,33	Rendah	25	25%
Total		99	100%
Skor rata – rata = 5,15 (sedang)			

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 6. diketahui bahwa sebanyak 62 responden dari keseluruhan jumlah responden yang ada atau sebanyak 62% tergolong dalam kategori yang tingkat pengetahuan yang sedang. Selain itu yang sebanyak 25% atau 25 responden yang mengisi benar dalam kuis terebut masuk dalam interval skor 0 - 3,33 yang berarti kategori rendah. Sedangkan sebanyak 12% atau sama dengan 2 responden memiliki tingkat pengetahuan akan Negara Kesatuan Republik Indonesia tinggi.

Tabel diatas menunjukkan hasil dari jawaban kuis soal yang sudah terhimpun dengan responden dari Pembina pramuka di Surabaya baik dari golongan siaga, penggalang, penengak, dan pandega. Jumlah skor yang terhimpun materi NKRI sebanyak 510 skor dengan rata – rata skor 5,15 yang berarti tergolong dalam kategori sedang. Sehingga tingkat pengetahuan NKRI Pembina pramuka di Surabaya masih termasuk sedang.

Tingkat Pengetahuan tentang Bhinneka Tunggal Ika

Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda – beda tetapi tetap satu jua dikarenakan Negara Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, rasa, dan budaya dengan jumlah pulau terbanyak. Untuk mengukur tingkat pengetahuan Pembina pramuka tentang Bhinneka Tunggal Ika dilakukan analisis menggunakan penentuan interval tinggi, sedang, dan rendah yang menggunakan rumus interval. Perhitungan ini akan dicocokkan dengan hasil tabulasi data kemudian untuk mengetahui persentase tingkat pengetahuan Pembina pramuka di Surabaya tentang Bhinneka Tunggal Ika maka dilakukan rumus persentase.

Tabel. 7 Persentase Tingkat Pengetahuan tentang Bhinneka Tunggal Ika

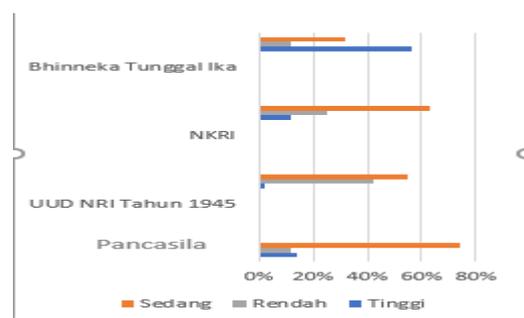
Interval	Kategori	Frekuensi	Presentase
6,68- 10	Tinggi	56	56%
3,34 – 6,67	Sedang	31	32%
0 – 3,33	Rendah	12	12%
Total		99	100%
Skor rata – rata = 7,26 (sedang)			

Sumber : Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa sebanyak 56 responden dari keseluruhan responden yang terdata atau sebesar 56% Pembina pramuka di Surabaya memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara 31 responden dengan presentase 31 % dari keseluruhan responden yang dibutuhkan menunjukkan Pembina pramuka berada dalam kategori sedang sedangkan yang tergolong dalam kategori Pembina pramuka yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah didapat dari 12 responden yang telah mengisi kuis atau sebanyak 12% yang tersebar di Surabaya.

Berdasarkan data di atas yang didapat dari hasil jawaban kuis soal yang telah dibagikan, rata – rata skor keseluruhan mencapai pada jumlah 7,26 yang tergolong dalam kategori tinggi akan pengetahuan pada materi Bhinneka Tunggal Ika. Rata – rata skor ini berasal dari jumlah skor 719. Angka ini didapat dari akumulasi 99 responden yang menjawab benar pada indikator Bhinneka Tunggal Ika yang mencapai 719 dibagi dengan jumlah keseluruhan responden.

Berdasarkan data perindikator yang telah disampaikan di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan Pembina pramuka tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan NKRI sama- sama memiliki kategori yang sedang sedangkan pada tingkat pengetahuan tentang Bhinneka Tunggal Ika berada pada kategori yang tinggi. Meskipun demikian hasil perindikator yang ada berbeda baik dalam persentasenya maupun skor rata – ratanya. Untuk mempermudah dalam melihat perbedaan hasil setiap indikator tingkat pengetahuan Pembina pramuka di Surabaya disajikan diagram sebagai berikut.



Grafik 1. Rincian per indikator Tingkat Pengetahuan Wawasan Kebangsaan Pembina Pramuka di Surabaya.

Berdasarkan grafik 1 diatas dapat diketahui bahwa indikator dengan persentase terbaik adalah pada tingkat pengetahuan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini karena terdapat 56 respon atau 56% Pembina Pramuka di Surabaya yang memiliki tingkat pengetahuan dengan kategori tinggi. Sebanyak 31% atau 31 Pembina Pramuka di Surabaya memiliki tingkat pengetahuan dengan kategori sedang. Sedangkan 12% atau sebanyak 12 Pembina Pramuka masih memiliki tingkat pengetahuan kategori rendah.

Indikator dengan persentase terburuk adalah indikator pada materi UUD NRI Tahun 1945. hal tersebut dikarenakan hanya terdapat 2 % atau 2 orang Pembina Pramuka di Surabaya yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap materi Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu sebanyak 55% atau 55 responden membuktikan tingkat pengetahuan Pembina pramuka berada pada kategori sedang. Sedangkan 43% atau 42 responden dari Pembina pramuka memiliki tingkat pengetahuan yang rendah terhadap Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap indikator wawasan kebangsaan yang telah dipaparkan memiliki rata – rata yang tergolong dalam kategori sedang.

Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan mengacu pada teori perkembangan moral dari Thomas Lickona yang memiliki tiga komponen yakni *moral knowing*, *moral feeling* dan *moral action*. Pembina pramuka yang baik adalah Pembina pramuka yang dapat memahami wawasan kebangsaan sehingga pemahaman akan terjadi apabila pengetahuan telah dimiliki seseorang.

Pada *moral knowing* atau pengetahuan moral, pengetahuan tentang wawasan kebangsaan yang mawadahi akan menjadi pedoman seseorang dalam menentukan perspektif berdasarkan sudut pandangnya, memikirkan dari hasil pemahaman akan suatu objek serta berpengaruh pada pengambilan keputusan seseorang. Kesemua komponen ini merupakan kualitas pemikiran yang membentuk tingkat pengetahuan seseorang. Tingkat pengetahuan Pembina pramuka akan wawasan kebangsaan di Surabaya ternyata berbeda- berbeda di setiap indikatornya. Rata – rata tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina pramuka di Surabaya secara umum berada pada kategori sedang.

Komponen *Moral Knowing* merupakan komponen yang dicari dalam penelitian ini. Pengetahuan merupakan hasil tahu seseorang melalui penginderaan yang dimiliki tentang objek tertentu. Pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat memengaruhi perasaan dan tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan analisis yang dilakukan ini memperoleh hasil rata – rata skor tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina Pramuka di Surabaya adalah 21,76 yang masih tergolong sedang dari rata rata maksimal 40. Diketahui bahwa terdapat 9 Pembina pramuka atau 9% dari 99 orang Pembina pramuka di Surabaya yang memiliki tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan yang tinggi berdasarkan data yang ditunjukkan. Lalu sebanyak 75 orang Pembina pramuka atau 76% orang Pembina pramuka di Surabaya memiliki tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan yang tergolong sedang sedangkan 15 orang lainnya Pembina pramuka di Surabaya memiliki tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan yang tergolong rendah.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa komponen *moral knowing* dinyatakan cukup baik secara rata – rata keseluruhan namun bukan berarti pengetahuan pembina pramuka cukup puas dalam tahap tersebut karena penampungan daya ingat setiap orang berbeda – beda tergantung daya pikir seseorang dalam mengingat informasi. Jika dari data pengetahuan wawasan kebangsaan ini dipecah setiap indikator Pancasila, Undang – Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika akan berbeda – beda rata – ratanya dimana Bhinneka Tunggal Ika memiliki skor rata – rata tinggi sebesar 7,26 dari skor total maksimal 10.

Sedangkan indikator yang lainnya pada kategori sedang. Namun dalam indikator Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia perbedaan secara signifikan pada jumlah responden yang tergolong tinggi, sedang dan rendah dimana pengetahuan UUD NRI tahun 1945 yang tergolong tinggi hanya sebesar 2 persen atau 2 responden saja. Ini berarti perlu ada perlakuan yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan akan peraturan perundang – undangan di Indonesia khususnya payung hukum yang dipakai untuk melindungi Pendidikan kepramukaan.

Komponen selanjutnya adalah *Moral Feeling* atau perasaan moral. Komponen ini mengarah kepada nilai – nilai kebangsaan yang ditunjukkan menjadi sikap dan perilaku yang nampak untuk Negara Indonesia pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan komponen yang terakhir adalah *Moral Action* atau perilaku moral. Komponen ini mendeskripsikan pada bukti perilaku yang ditunjukkan untuk merepresentasikan rasa kebangsaan. Lickona (2012:84) mengatakan seseorang dikatakan memiliki kepribadian yang baik apabila *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* terpenuhi secara positif. Namun dalam penelitian ini berfokus pada *moral knowing* pembina pramuka dalam memahami wawasan kebangsaan sebagai ilmu pengetahuan yang harus dimiliki seorang pembina pramuka. Pengetahuan tentang wawasan kebangsaan ini yang akan menjadi pedoman seseorang dalam menentukan perspektif berdasarkan sudut pandangnya, memikirkan dari hasil pemahaman akan suatu objek serta berpengaruh dalam pengambilan keputusan seseorang. *Moral feeling* dan *moral knowing* dalam penelitian ini tidak dicari secara mendalam karena keterbatasan waktu dan instrumen penelitian. Maka dalam penelitian ini tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina pramuka di Surabaya dinyatakan sedang pada tahap *moral knowing* saja.

Secara keseluruhan, dari hasil analisa yang telah dilakukan ternyata tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina pramuka berada dalam kategori sedang . Penelitian ini jika dilihat dengan pendekatan sosiologis dan politis , masing – masing

indikator memiliki kecenderungan yang berbeda. Pada materi Pancasila orientasi kajiannya mengarah kepada orientasi kajian politis dan sosiologis. Pada NKRI dan UUD NRI Tahun 1945 lebih mengarah kepada pendekatan politis sedangkan pada Bhinneka Tunggal Ika kecenderungan orientasi kajian sosiologi lebih tinggi. Berikut ini kecenderungan orientasi kajian yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel. 8 Hasil Pendekatan Orientasi Kajian Wawasan Kebangsaan Pembina Pramuka di Surabaya

Wawasan	Orientasi Kajian	Tingkat Pengetahuan
Pancasila	Sosiologis , Politis	Sedang
NKRI	Politis	Sedang
UUD NRI Tahun 1945	Politis	Sedang
Bhinneka Tunggal Ika	Sosiologis	Tinggi

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa budaya kebhinekaan lebih dekat pada masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Pengetahuan wawasan kebangsaan yang bersinggungan dengan kelembagaan lebih rendah daripada pengetahuan wawasan yang berhubungan langsung dengan nilai – nilai kemasyarakatan. Melihat analisa data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hanya indikator Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki kategori tinggi. Lebih dari setengah dari keseluruhan responden memiliki pengetahuan yang baik tentang kebhinekaan. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan kemajemukan masyarakatnya.

Sedangkan pada wawasan Pancasila, ideologi negara ini berakar dalam kehidupan masyarakat yang terjabarkan dalam sila-sila Pancasila seperti kehidupan beragama yang ada dalam berbagai bentuk kepercayaan. Pendidikan kepramukaan didasari atas rasa suka rela dan tidak mementingkan agama manapun sehingga siapapun dapat bergabung namun juga tidak meninggalkan unsur politis dari Pancasila itu sendiri. Bentuk suka rela ini membuat hak asasi manusia anggota pramuka dilindungi dalam suatu organisasi yang dinamakan Gerakan Pramuka.

Syamsir,dkk (2019:7) mengatakan bahwa sosiologi dipahami sebagai ilmu kehidupan antarmanusia yang di dalamnya mengkaji latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai kelompok maupun individu serta perubahan – perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Sedangkan pada pendekatan politis dalam perjuangan politis bangsa Indonesia dalam hal menentang berbagai kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yang tidak berorientasi kepada nilai – nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Nusantara.

Menurut Notoatmodjo (dalam Yuniar , 2010 : 11) ada beberapa yang memengaruhi pengetahuan seseorang. Dalam segi indikator pertama adalah berdasarkan

Pendidikan. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi yang dapat menunjang kualitas hidup. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah menerima informasi. Pembina pramuka dididik dengan beberapa tahap menurut Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 04 tahun 2018 tentang Pedoman Anggota Dewasa Gerakan Pramuka antara lain Kursus Orientasi, Kursus Pembina Pramuka Tingkat Mahir Dasar (KMD), Kursus Pembina Pramuka Tingkat Mahir Lanjutan (KML).

Kurikulum yang diberikan di setiap jenjang kursusnya juga berbeda sesuai tingkatannya. Misalkan jika ingin mempelajari terkait bentuk, fungsi, dan peran Gerakan Pramuka maka dilakukan pada jenjang Kursus Orientasi. Pada KMD pembina pramuka dengan menghasilkan peserta didik yaitu anggota pramuka yang berkarakter, berkebangsaan, berkecakapan hidup, dan peduli lingkungan sesuai dengan jenjangnya. Sedangkan pada KML Pembina pramuka sudah mampu menjadi ketua gugus depan dan dapat memajemen pengelolaan gugus depan dalam proses Pendidikan kepramukaan yang dapat mencapai tujuan Gerakan Pramuka.

Kedua, pekerjaan merupakan faktor yang memengaruhi pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari lingkungan pekerjaannya. Seseorang akan yang lebih banyak berinteraksi dengan orang lain juga akan memengaruhi pengetahuannya. Pengalaman dan ketrampilan profesional serta pengalaman belajar akan dapat mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan. Permendikbud No.63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mengatakan Pembina pramuka yang akan terlibat langsung dengan peserta didik dapat berasal dari bidang non pramuka sehingga guru saat ini dibekali untuk mengikuti kursus dan menjadi Pembina pramuka untuk melaksanakan tugas tambahan yang dihitung sebagai bagian pemenuhan beban kerja guru dengan beban kerja paling banyak 2 jam pelajaran per minggu.

Ketiga, usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan dan bertambah setiap tahun dalam pengulangan yang sama tanggalnya. Semakin cukup umur tingkat kematangan akan pengetahuan juga semakin matang karena setiap tahun mengalami hal berbeda yang terkumpul dalam memori membentuk pengalaman. Terakhir adalah lingkungan dimana perilaku individu akan berbeda setiap individu tergantung lingkungan yang dapat memengaruhi perkembangannya.

Meskipun data yang dianalisis mengatakan pengetahuan pada materi Bhinneka Tunggal Ika tergolong tinggi bukan berarti semua pembina pramuka di Surabaya telah memahami arti kebhinekaan dengan baik. Berdasarkan data penelitian ini terdapat 31 responden memiliki interval pada kategori sedang dan 12 responden

lainnya masih tergolong dalam karegori rendah. Dalam kehidupan bersama kebhinekaan dapat potensi untuk Indonesia namun juga menjadi ancaman tergantung cara pandang dan pengelolaan.

Tingkat pengetahuan pembina pramuka di Surabaya pada Bhinneka Tunggal Ika lebih mengarah pada pengetahuan secara konsep kebhinekaan sehingga soal yang tertulis pada angket penelitian dalam tingkat mengetahui tinggi seperti asal semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan pada tahap menganalisis maupun mencipta Pembina pramuka di Surabaya banyak yang belum paham. Tahap mencipta yang diaplikasikan dalam angket penelitian ini berupa produk hukum yang menjelaskan tentang kebhinekaan seperti lambang negara yang berupa Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika memiliki payung hukum yang ditulis pada UUD NRI Tahun 1945. Hanya 30 responden dari 99 responden yang dapat menjawab dengan benar terkait hal ini yaitu pada pasal 36A.

Beberapa alasan yang akan disampaikan dalam penelitian ini tentang mengapa indikator Bhinneka Tunggal Ika tergolong dalam kategori tinggi. Pertama, Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang menerima anggota secara terbuka. Selain itu Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan yang secara suka rela, tidak membedakan suku, ras, golongan terhadap anggotanya (AD/ART Gerakan Pramuka,2012). Dengan munculnya Permendikbud No 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah banyak dibutuhkan pembina pramuka untuk mendidik anggota sehingga sekolah menyarankan guru yang akan mendamping ekstrakurikuler pramuka untuk mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar yang menjadi persyaratan sertifikasi sebagai seorang pembina.

Kedua, pendidikan kepramukaan memiliki penyelenggaraan kepramukaan yang dibedakan setiap golongannya mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Jenjang pertemuan pramuka dalam Gerakan Pramuka diturunkan sesuai dengan struktur wilayah antara lain pada lingkungan pusat dinaungi Kwarnas, provisi dinaungi Kwarda, kabupaten / kota dinaungi Kwarcab serta pada wilayah kecamatan dinaungi oleh Kwarran. Pertemuan pramuka dilaksanakan guna menumbuhkan rasa kekeluargaan yang didapat dari anggota berbagai daerah, meningkatkan ketrampilan karena saling bertukar pengalaman serta menambah wawasan baru yang mungkin belum didapat di gugus depannya masing – masing.

Pertemuan pramuka biasanya merupakan perwakilan dari pangkalan di gugus depannya masing – masing yang dipilih untuk mewakili sesuai tingkat kegiatan tersebut sehingga anggota pramuka dapat berinteraksi dari berbagai pangkalan dan mendapatkan banyak teman dari berbagai

golongan. Adapun jika menjadi perwakilan kegiatan nasional maupun internasional akan semakin besar peluang untuk dapat berkomunikasi dan bertukar pengalaman dengan orang lain. Kegiatan yang diadakan oleh Gerakan Pramuka seperti ini juga turut membangun rasa persatuan dan kesatuan anggota pramuka di seluruh Indonesia. Menurut Trianto (2019: 343) di zaman sekarang maupun yang akan datang hal terpenting yang akan menjadi dasar tumbuh kembangnya Indonesia khususnya pada nasionalismenya adalah persatuan dan kesatuan.

Ketiga, pendidikan kepramukaan merangkul semua anggota tanpa mengunggulkan satu agama saja. UU No. 12 Tahun 2010 pasal 4 yakni Gerakan Pramuka dibentuk untuk menumbuhkan kepribadian yang berakhlak mulia, taat akan peraturan, menjunjung tinggi nilai – nilai kebangsaan, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa guna menjaga NKRI serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari – hari. Berdasarkan landasan tersebut *stake holder* Gerakan Pramuka merumuskan kurikulum untuk anggota pramuka yang salah satunya disebut dengan Syarat Kecakapan Umum (SKU). Peserta didik dalam hal ini anggota Gerakan Pramuka wajib memiliki buku SKU dan menyandang Tanda Kecakapan Umum guna pengembangan minat dan bakatnya. Menurut Kurniawan (2013:17) SKU bukanlah soal ujian sekolah yang menyulitkan siswa dan disarankan untuk menempuh SKU kepada seorang yang ahli dibidangnya. Artinya tidak harus dari pembina pramuka yang menjadi orang yang menguji semua isi pasalnya. Misalkan pada poin keagamaan.

Setiap jenjang Pendidikan dalam kepramukaan memiliki tingkat kesulitan masing masing di golongannya baik itu siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Poin keagamaan menjadi poin pertama yang dibahas dalam setiap jenjangnya. Sebagai contoh pada golongan penggalang pada poin keagamaan untuk agama islam pasal pertama membahas tentang hari – hari besar agama di Indonesia dan menjalankan ibadah agamanya secara pribadi maupun individu. Contoh tersebut merupakan poin keagamaan golongan penggalang tingkat penggalang ramu. Selain dari agama Islam, agama lain seperti kristen katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Setiap golongan memiliki penugasan yang berbeda – beda berdasarkan tingkatan yang dijalani setiap jenjangnya.

Pada Kristen katolik dapat menyebutkan dapat berdoa Rosario dan tahu artinya. Pada Kristen Protestan yaitu dapat menyanyikan beberapa nyanyian gereja. Pada agama Hindu, dapat menyebutkan nama-nama penerima wahyu para Maharsi dan pada agama Buddha salah satunya dapat menjelaskan arti/makna simbol yang terdapat di Altar Buddha. Sedangkan contoh lain pada golongan pandega pada poin keagamaannya mengujikan kepada peserta didik berupa memahami aturan dan dapat menjama' dan

mengqashar sholat serta mampu menjadi imam dalam sholat berjama'ah. Selanjutnya juga dapat menjelaskan makna rukun iman, rukun islam, dan ihsan serta memberikan contohnya, dapat mengurus jenazah. Pada Kristen Katolik adalah dapat menyebut dan menghayati 5 pondasi hidup bersekutu, menggereja, mendalam, saling melayani, serta bersaksi. Pada Kristen protestan salah satunya adalah dapat memimpin suatu kelompok dalam mempelajari Alkitab. Pada agama Buddha salah satunya adalah dapat menyebutkan bagian – bagian dari kitab Abhidhamma Pitaka dan kitab suci Tripitaka Bagian Sutta.

Pada indikator Bhinneka Tunggal Ika dalam analisis data menjelaskan bahwa rata – rata skor berada dalam kategori tinggi. Namun perbedaan jumlah tidak menunjukkan nilai yang signifikan untuk jumlah responden yang tergolong pada kategori tinggi dan rendah yaitu perbedaan selisih 25 responden. Kelemahan Pembina pramuka dalam indikator Bhinneka Tunggal Ika melihat hasil tabulasi yang sudah dikumpulkan pada soal terkait peraturan yang mengatur suatu konsep tersebut yaitu produk hukum yang diberlakukan. Secara sosiologis nilai – nilai yang sesuai dengan kehidupan masyarakat lebih dipahami oleh nalar daripada memikirkan unsur politis yang membentuk keilmuan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada tingkat pengetahuan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hanya menghasilkan 2 persen atau 2 pembina pramuka di Surabaya yang tergolong dalam kategori tinggi. Padahal Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi tertinggi dan menjadi landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang – undangan dibawahnya. Ini berarti produk-produk hukum berupa undang – undang yang menjadi landasan Pendidikan Kepramukaan sudah pasti landasan tertinggi berpedoman pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Muhtaj (2009:31) berpendapat berbicara tentang organisasi pada bidang tertentu tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang konstitusi. Tidak bisa dibayangkan apabila organisasi berjalan tanpa payung hukum yang tertinggi yang melindungi. Maka dari itu dapat dikatakan semua negara pasti memiliki konstitusi. Begitu juga pada organisasi Gerakan Pramuka tentu memiliki payung hukum yang kuat yang juga berlandaskan pada UUD NRI Tahun 1945 kemudian menganalisis pada bagian yang sesuaikan kebutuhan Gerakan Pramuka sehingga terbitlah berbagai undang – undang maupun keputusan kwartir nasional seperti UU No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Idealnya dalam suatu organisasi, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang bisa disebut juga konstitusi ini didukung dan dilaksanakan dalam kehidupan

sehari – hari baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari – sehari maka setidaknya pengetahuan terhadap konstitusi perlu dikuatkan baik dari segi pengetahuan tentang konstitusi (aspek *civic knowledge*), dari pengetahuan kemudian terbentuk sikap sebagai warga negara yang baik (*moral feeling*) kemudian akan membentuk watak atau karakter yang baik terhadap konstitusi (*civic disposition*).

Meskipun dalam data penelitian terkait Tingkat pengetahuan Pembina Pramuka di Surabaya tentang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara rata – rata tergolong sedang namun melihat diagram yang ditampilkan hanya 2 persen saja atau 2 orang saja yang mendapatkan kategori tergolong tinggi sedangkan lebih dari 50 responden yang artinya lebih dari setengah responden ini memiliki tingkat pengetahuan yang sedang serta 42 persen atau 42 orang memiliki tingkat pengetahuan pembina pramuka di Surabaya akan Undang – Undang Negara Republik Indonesia rendah. Padahal latar belakang munculnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka adalah karena kesadaran bertanggungjawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu juga, banyak payung hukum yang memberikan perlindungan bagi kehidupan anggota pramuka untuk menjalankan pendidikan kepramukaannya seperti Undang – Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Kepemudaan, SK Kwarnas nomor 080 tahun 2008 tentang Pola dan mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, Petunjuk Penyelenggaraan Pertemuan Pramuka, SK Kwarnas nomor 231 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka, SK Kwarnas nomor 178 tahun 1979 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Upacara di Dalam Gerakan Pramuka dan masih banyak surat keputusan lain yang dikeluarkan Kwartir Nasional guna menyempurnakan bentuk pendidikan kepramukaan di Indonesia. Sehingga setiap lima tahun sekali ada pertemuan pejabat pramuka yang mewakili setiap daerah untuk merumuskan rencana strategis setiap lima tahun sekali yang hasilnya dinamakan Hasil Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa minat baca Pembina pramuka di Surabaya khususnya yang berupa naskah kontekstual ini kurang mengakar pada diri Pembina pramuka. Menurut Rahmawati (2019:29) kunci sukses seseorang dalam kualitas pengetahuan dan wawasannya dilihat dari tingkat minat bacanya. Hal ini sejalan dengan teori Thomas Lickona dalam Hudi (2017 : 43) dalam penelitiannya

bahwa pengetahuan moral (*moral knowing*) mempengaruhi perilaku moral (*moral action*). Manusia bertindak berangkat dari pengetahuan yang ia miliki dan dimanapun ia berada. Pengetahuan dapat diperoleh berdasarkan pengalaman atau literasi tertulis yang mudah diperoleh baik media cetak maupun media elektronik. Proses pelaksanaan Pendidikan kepramukaan juga diawali oleh Robert Boden Powell yang menulis buku terkenal dan dijadikan pedoman di seluruh dunia dalam menerapkan pendidikan kepramukaan bernama “*Scouting for Boys*”. Buku ini isinya tentang bagaimana menjadi seorang pramuka dan cermat bertahan hidup di alam. Buku ini juga yang menjadi cikal bakal buku tentang kepramukaan lainnya khususnya dalam perkembangan literasi kepramukaan di Indonesia.

Gerakan pramuka merupakan kegiatan yang menyenangkan. Ada beberapa metode Pendidikan Kepramukaan yang telah dirumuskan melalui kegiatan yang menyenangkan, menantang, dan menarik sesuai kondisi anggota pramuka. Hal ini sejalan dengan Bodel Powell (2003:223) dalam bukunya “*Scouting for Boys*” yang mengungkapkan “*Scouting is a fine game, if we put our backs into it and tackle it well, and no game is any good to anyone unless he works up some kind of enthusiasm about it*”. Artinya adalah bahwa kegiatan kepramukaan merupakan kegiatan yang menyenangkan apabila kita baik dalam menangannya dan tidak ada permainan yang baik apabila tidak ada antusiasme tentang itu”. Konsep ini menjelaskan bahwa pendidikan yang baik dibuat dengan berbagai macam metode yang ditawarkan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan dan metode ini akan berhasil apabila rasa antusiasmenya juga tinggi dari subjek yang akan belajar. Sama halnya dengan metode kepramukaan yang ada seperti belajar sambil melakukan, kegiatan di alam terbuka, kiasan dasar, sistem satuan terpisah, kemitraan dengan anggota dewasa, kegoatan berkompetisi bekerjasama, berkelompok, kegiatan yang menarik dan menantang. Semua metode ini tidak akan berguna apabila perasaan malas dalam membaca kurang diminati Pembina Pramuka. (Warif 2019:48).

Pada indikator Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia rata – rata skor yang diperoleh secara keseluruhan menunjukkan kategori sedang. Sebenarnya pengetahuan akan Pancasila dan Negara Kesatuan telah diaplikasi disetiap proses pembelajaran pendidikan kepramukaan. Menurut (Marwadani 2019:134-148) Nilai – nilai luhur Pancasila dijadikan sebagai tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hidup manusia. Nilai – nilai yang terkandung ke dalam 5 sila ini juga diterapkan dalam pendidikan karakter seorang pramuka. Misalkan nilai – nilai Pancasila yang dijadikan bukti bahwa kegiatan pendidikan kepramukaan juga tidak lepas dari ideologi negara yaitu kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka adalah norma (aturan) yang menjadi ukuran

akhlak budi pekerti seorang pramuka dan standar tingkah laku pramuka di masyarakat.

Kode kehormatan merupakan ketentuan dan janji moral pramuka. Janji sebagai pramuka dinamakan Satya. Sedangkan moral dijabarkan dalam poin nilai – nilai yang disebut Darma. Satya dan darma dalam golongan penggalang berbeda dengan golongan penggalang, penegak, pandega serta anggota dewasa. Pembina pramuka termasuk dalam kategori anggota dewasa yang mengantarkan peserta didiknya menjadi kaum muda Indonesia menjadi lebih baik. Ada tiga janji yang selalu diucapkan sebagai baik untuk golongan penggalang, penegak, pandega, dan Pembina. Pertama, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Ketiga, menepati Dasa Darma.

Kode kehormatan pramuka hendaknya diterapkan Pembina untuk dirinya sendiri dan ditanamkan kepada peserta didik melalui kegiatan yang menarik dan menantang. Kode kehormatan ini merupakan salah satu bentuk metode yang diajarkan kepada anggota pramuka dari Pembina. Selain kode kehormatan, kegiatan pramuka merupakan salah satu elemen fundamental dalam mendukung tercapainya tujuan yaitu metode kepramukaan terdiri dari belajar sambil melakukan, kegiatan di alam terbuka, kiasan dasar, sistem satuan terpisah, kemitraan dengan anggota dewasa, kegiatan berkompetisi bekerjasama, berkelompok, kegiatan yang menarik dan menantang (Kurniawan(2013:5).

Dalam penelitian ini alasan mengapa pembina pramuka di Surabaya tergolong sedang akan tingkat pengetahuan wawasan kebangsaannya karena ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam pendidikan kepramukaan dipraktikkan dengan kegiatan yang menarik dan menantang oleh pembina pramuka. Sejalan dengan Farabta (2019:37-54) bahwa kegiatan pramuka tidak hanya mengenai teori saja namun dipraktikkan sesuai materi kepramukaan itu sendiri karena kegiatan yang dilakukan langsung dan berorientasi pada aksi akan lebih mengena dan terpatir dalam pikiran anggota pramuka. Namun disisi lain, Pembina pramuka kurang memahami aturan – aturan secara kontekstual yang telah menjadi payung hukum Gerakan Pramuka sehingga perlu adanya pemberian wawasan akan perundang – undangan dan ketatanegaraan kepada Pembina pramuka yang wujudkan dalam bentuk pelatihan agar sisi pemahaman teori dan praktik dapat seimbang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pembina

Pramuka di Surabaya memiliki tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan yang sedang. Rata – rata skor tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan Pembina Pramuka di Surabaya adalah 21,76 yang masih tergolong sedang dengan rata-rata maksimal 40. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 9 Pembina pramuka atau 9% dari 99 orang Pembina pramuka di Surabaya yang memiliki tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan yang tinggi. Lalu sebanyak 75 orang Pembina pramuka atau 76% orang Pembina pramuka di Surabaya memiliki tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan yang tergolong sedang sedangkan 15 orang lainnya Pembina pramuka di Surabaya memiliki tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan yang tergolong rendah.

Ditinjau dari indikator Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika diketahui bahwa indikator Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan indikator terburuk. Ini membuktikan bahwa Pembina pramuka lemah terhadap peraturan perundang – undangan dan ketatanegaraannya. Daya baca yang kurang membuat literasi Pembina pramuka sempit dan akan berimbas pada sikap dan tindakan yang dilakukan. Jika hal tersebut terjadi akan berimbas pada menurunnya pengetahuan wawasan kebangsaan hingga rasa kebangsaannya.

Saran

Pertama, pihak akademis diajarkan melakukan penelitian lebih lanjut tentang wawasan kebangsaan pramuka di Surabaya berdasarkan *moral feeling* dan *moral action* yang munculkan.

Kedua, pihak pemerintah dianjurkan untuk meningkatkan sosialisasi yang bersifat ketatanegaraan kepada masyarakat potensial khususnya kepada Pembina pramuka agar semangat kebangsaan diimbangi dengan pengetahuan akan wawasan kebangsaan.

Ketiga, Kwartir Cabang Kota Surabaya perlu membuat strategi yang baik untuk mengajarkan wawasan kebangsaan pada pengetahuan peraturan perundang – undangan bagi para Pembina pramuka. Mengingat Gerakan Pramuka merupakan pendidikan non formal yang tujuan utamanya menguatkan karakter, kebangsaan, dan kecakapan peserta didik.

Keempat, program bela negara yang digagas oleh Kementrian Pertahanan tidak hanya direncanakan untuk mahasiswa namun seharusnya kepada organisasi kepemudaan lainnya khususnya pada Gerakan Pramuka karena terdapat kesamaan sasaran dalam meningkatkan kualitas generasi Indonesia.

Keenam, bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mengadakan pelatihan -pelatihan atau *workshop* tentang bela negara untuk guru karena sebagian besar Pembina

pramuka berasal dari kalangan guru sekolah. Pelatihan dapat bekerjasama dengan dinas – dinas terkait yang mendukung kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, David Krathwohl. 2001. "A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing". Dalam Agung Prihantoro. 2010.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Tahun 2012
- Azwar, A. 2002. *Pengantar Epidemiologi*. (edisi revisi) Jakarta Barat : Binarupa Aksara.
- Arfa'i. 2013. " Bentuk Negara Republik Indonesia ditinjau Ditinjau Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Inovatif*. Vol. 6 (7). Hal 142 – 154.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Badudu, J.S., Sutan Mohammad. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Basseng. 2019. *Modul Pelatihan Dasar CPNS (Wawasan Kebangsaan dan Nilai – Nilai Bela Negara*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
- El-Muhtaj, Majda. 2009. Hak Asasi Manusia dalam Konsitusi Indonesia. Jakarta : Kencana
- Farabita. 2019. " Upaya Bela Negara Melalui Kegiatan Kepramukaan Bagi Mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Muhammadiyah Surakarta". *Civics Education and School Science Journal*. Vol 1 (1). Hal 37 – 54.
- Halim. 2008. *Menggal Oase Toleransi*. Kompas 14 April 2018
- <https://jogja.suara.com/read/2020/01/13/152823/ajarkan-yel-yel-berunsur-sara-pembina-pramuka-dipanggil-kwarcab-jogja> diakses tanggal 13 Januari 2020 pukul 09.00 WIB
- <https://www.suara.com/news/2017/06/09/001300/ppp-tujuh-persen-wni-ingin-ubah-nkri-jadi-negara-khilafah> diakses online pada tanggal 27 Januari 2020 08.05 WIB
- Hudi. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Moral Terhadap Perilaku Moral pada Siswa SMP Negeri Kota Pekan Baru Berdasarkan Pendidikan Orangtua". *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. Vol 2 (1). Hal 30-44
- Irham. 2012. "Pengamanan Pilar Bangsa dan Masa Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 6 (1). Hal 125 – 149.
- Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 176 Tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
- Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Anggota Dewasa Gerakan Pramuka
- Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
- Kurniawan. 2013. *Black Book of Rover Scout*. Surabaya : AE Publishing.
- Lickona. 2013. *Educating for Character*. Jakarta : Bumi Aksara
- Marwadani. 2019 . "Implementasi Nilai Luhur Pancasila Melalui Kegiatan Bakti Mahasiswa Untuk Memperkuat Komitmen Kebangsaan Pada Generasi Milenial". *Jurnal PEKAN*. Vol 4(2). Hal. 134-148
- Notoamodjo. 2010. "Metodologi Penelitian Kesehatan" Dalam Masturoh, Imas dan Nauri Anggita. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan Bahan Ajar Rekam Medis dan Infoemasi Kesehatan (RMIK)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nurwardani, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Pandega Nomor 176 tahun 2013
- Powell. 2003. *Scouting For Boys*. London: The scout Association
- Rahmawati. "Menumbuh Kembangkan Minat Baca Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris". *Jurnal Kependidikan*. Vol. 4 (1). Hal 28-36.
- Silviana. R. 2007. *Hubungan Komposisi Kelompok dengan Sikap Etnosentrik*. Skripsi. Medan: Program Studi Psikologi Universitas Sumatera
- Sistem Informasi Pengelolaan Anggota Gerakan Pramuka Tahun 2019
- Sukriono. 2016. "Membangun Kesadaran Berkonstitusi Terhadap Hak – Hak Konstitusional Warga Negara Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi". *Jurnal Legilasi Indonesia*. Vol. 13 (3). Hal. 273-284
- Syamsir, dkk. 2017. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Palembang : Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat
- Trianto. 2019. "Tingkat Nasionalisme Anggota UKM Oni-Giri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa

Timur”. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol.7 (2). Hal. 331-345.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Warif. 2019. “Strategi Guru Kelas Dalam Menghadapi Peserta Didik yang Malas Belajar”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol 4 (1). Hal.39-55.

Widodo. 2019. “Membangun Wawasan Kebangsaan yang Religius Demi Mewujudkan Integrasi Nasional Melalui Pendidikan kewarganegaraan”. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4 (3). Hal.13-24